

**PENYEBAB DAN DAMPAK
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
PERTANIAN MENJADI NONPERTANIAN
DI DESA TRIHANGGO KECAMATAN GAMPING
KABUPATEN SLEMAN**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

**MUSTAGHFIRUDDIN
NIM : 07162310/P**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

INTI SARI

Salah satu permasalahan yang dialami bangsa Indonesia adalah jumlah penduduk yang tinggi dan laju pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahunnya yang juga tinggi. Semakin banyak jumlah penduduk, maka kebutuhan tanah nonpertanian juga semakin banyak. Penggunaan tanah yang dulunya dipergunakan untuk pertanian berubah menjadi nonpertanian. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian (jenis, luas, dan sebaran spasial). Menganalisis penyebab perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian. Menganalisis dampak perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian. Menganalisis upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo.

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei, dengan teknis analisis menggunakan tabel dan peta. Data primer dari penelitian ini adalah jenis penggunaan tanah, luas, lokasi, penyebab, dampak, dan upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian. Data sekunder penelitian ini adalah data Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, data Ijin Pemanfaatan Tanah, data Ijin Penetapan Lokasi, Peta Rencana Detail Tata Ruang Wilayah, data toponimi, dan data kependudukan.

Hasil penelitiannya adalah jenis perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo menjadi rumah, perumahan, tempat usaha nonpertanian, fasum, dan fasos seluas 68,9452 Ha (20%), dan sebaran spasial perubahannya mengikuti jaringan jalan. Penyebabnya karena : penyebab intern (pemenuhan kebutuhan petani dan sempitnya tanah pertanian yang dimiliki), penyebab ekstern (kepadatan penduduk, tingginya laju urbanisasi, peningkatan nilai ekonomi sawah di lokasi strategis, pembangunan proyek pemerintah, dan perkembangan kota), dan penyebab peraturan dan implementasinya (kurang memahami Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, kurang tegasnya pelaksanaan dan sanksi peraturan yang ada). Dampaknya adalah dampak positif (fisik (tata letak tempat tinggal diperumahan menjadi rapi dan tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial), ekonomi (ketersediaan lapangan pekerjaan baru seperti tukang batu, tukang kayu, satpam, sopir, dan buruh nonpertanian), sosial (perubahan mata pencaharian petani menjadi nonpertanian)) dan dampak negatif (fisik (pencemaran lingkungan (sampah) dan penciptaan tanah pertanian), ekonomi (petani tidak memiliki tanah pertanian lagi, petani kehilangan pekerjaan, dan merugikan pemerintah dalam investasinya di sistem irigasi), sosial (menurunnya perilaku kelembagaan masyarakat seperti wiwit, gotong royong, dan ronda malam)). Upaya pengendalian yang dilakukan dengan membuat peraturan, sosialisasi (baik media elektronik maupun secara langsung), dan memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaku perubahn penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian. Pelanggaran peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian masih ada di Desa Trihanggo.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
INTI SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Perbandingan Penelitian Terdahulu	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	14
1. Penggunaan Tanah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	14
2. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian dan Penyebabnya	19
3. Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian	28
4. Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian	32
B. Kerangka Pemikiran	35
C. Anggapan Dasar	39
D. Definisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Format Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	46
E. Populasi dan Sampel	47
F. Analisis Data	48
G. Sistematika Pokok Penelitian	51
H. Jadwal Penelitian	53

BAB IV	GAMBARAN UMUM DESA TRIHANGGO	
	A. Letak Geografis dan Wilayah Administratif	54
	B. Karakteristik Fisik	56
	1. Iklim	56
	2. Topografi	57
	3. Hidrologi	57
	4. Jenis Tanah	58
	C. Kependudukan	58
	D. Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	60
	1. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan	60
	2. Fasilitas Komunikasi, Informasi, dan Penerangan	61
	3. Fasilitas Keagamaan	62
	E. Kegiatan Perekonomian	62
	F. Penggunaan Tanah	63
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo	66
	1. Jenis Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo	66
	2. Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo	75
	3. Sebaran Spasial Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo	83
	B. Penyebab Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo	95
	1. Penyebab Intern	98
	2. Penyebab Ekstern	103
	3. Penyebab Peraturan dan implementasinya	108
	C. Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo	111
	1. Dampak Positif	115
	a. Fisik	115
	b. Ekonomi	117
	c. Sosial	119
	2. Dampak Negatif.....	120
	a. Fisik	120
	b. Ekonomi	122
	c. Sosial	125
	D. Upaya Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo	127
	1. Upaya Pengendalian	128
	a. Peraturan	129
	b. Sistem dan Manajemen	132
	c. Insentif dan Disentif	133

	Halaman
d. Sosialisasi	134
2. Pelanggaran	141
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150
LAMPIRAN	153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dialami bangsa Indonesia adalah jumlah penduduk yang tinggi dan laju pertumbuhan jumlah penduduk tiap tahunnya yang juga tinggi. Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Wynandin Imawan dalam seminar Dimensi Penduduk dan Pembangunan Berkelanjutan mengatakan, hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai 237,56 juta jiwa yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat (Tempo, 19 Oktober 2010). Hasil sensus ini diluar perkiraan, pada tahun 2007 Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan berjumlah 234,2 juta dengan penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk periode 2000-2010 mencapai 32,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen lebih besar dari pada periode 1990-2000 yang hanya 27,5 juta dengan laju pertumbuhan penduduk 1,45 persen (Suara Indonesia, 24 Agustus 2010).

Menurut Marwinto (1986, dalam Setyoningsih, 2009:1) seiring bertambahnya waktu, jumlah manusia juga akan semakin bertambah. Hal ini menyebabkan jenis dan intensitas kegiatan manusia juga berkembang dan konsekuensinya adalah kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Tanah merupakan tempat tinggal manusia untuk menjalankan segala

aktifitasnya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai kegiatan dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari tanah, seperti halnya untuk bercocok tanam, mendirikan bangunan seperti perumahan, jalan, jembatan, pertokoan, gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Kegiatan manusia dalam menggunakan tanah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pangan dan papan. Manusia dalam memenuhi kebutuhan papan senantiasa akan melakukan perubahan penggunaan tanah dari satu jenis ke jenis penggunaan tanah lainnya baik secara terencana maupun untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang tidak dapat dielakkan lagi.

Kebutuhan terhadap tanah makin meningkat, beragam, dan makin meluas seiring dengan meningkatnya populasi penduduk dan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Mengingat semakin banyak kebutuhan akan tanah dan ketersediaan akan tanah relatif tetap, maka manusia senantiasa akan bersaing untuk memperoleh tanah dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dari persaingan ini akan menimbulkan berbagai permasalahan pertanahan. Empat prinsip pertanahan khususnya poin 4 yang mengatakan Pertanahan harus berkontribusi menciptakan harmoni, kerukunan, kenyamanan sehingga konflik sengketa pertanahan harus dikurangi, sehingga dalam sebelas agenda pertanahan poin 5 adalah menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan diseluruh Indonesia secara sistematis. Perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan dapat diatasi dengan di dukung poin 9 dan 11 dalam sebelas agenda pertanahan, yaitu

melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan pertanahan yang telah diterapkan dan mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan. Perubahan penggunaan tanah yang tidak terkendali akan menimbulkan berbagai dampak negatif, sehingga perlu adanya penatagunaan tanah. Penatagunaan tanah merupakan salah satu manajemen pertanahan, yaitu pengaturan tanah yang dilakukan secara terus menerus, bertahap, tatkala penguasaan dan kepemilikan tanah sudah jelas.

Menurut I Made Sandy (1995, dalam Arafat, 2009 : 4) tanah dapat dipandang sebagai :

1. “Hasil”, kalau dilihat dari sudut barang tambang. Sebagai hasil penambangan, tanah dijual dan dibeli dalam ukuran berat (ton, kg) dan dalam ukuran isi atau ukuran m³ seperti tanah urugan;
2. “Penghasil”, kalau dilihat dari sudut tumbuhan dan tanaman, tanahlah yang ‘menghasilkan’ sumber daya hutan. Tanah juga yang menghasilkan pelbagai jenis tanaman lainnya. Ukuran tanah sebagai “penghasil” ini bukan hanya subur atau tidak subur, melainkan juga ada ukuran lainnya. Misalnya tutupan batu yang menyebabkan tanah itu susah diolah, lereng terlalu terjal, atau letaknya terlalu tinggi, sehingga tanaman tidak sesuai dengan iklimnya;
3. “Tempat”, di atas mana makhluk melaksanakan kehidupan. Sebagai tempat, atau ruang (“space”) tanah itu diukur dengan ukuran luas (Ha, meter). Disamping itu juga tanah merupakan “tempat”, dimana tersimpan semua jenis sumber daya tambang dan sumber daya air.

Proses perubahan penggunaan tanah pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud tercermin dari adanya : (1) pertumbuhan aktifitas pemanfaatan sumber daya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan tanah sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan per kapita, serta (2) adanya pergeseran kontribusi

sektor-sektor pembangunan dari sektor primer khususnya sektor pertanian ke aktifitas sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa). Di dalam hukum ekonomi pasar, perubahan penggunaan tanah berlangsung dari aktifitas dengan *land rent* yang lebih rendah ke aktifitas dengan *land rent* yang lebih tinggi, dimana *land rent* diartikan sebagai nilai keuntungan yang lebih bersih dari aktifitas pemanfaatan tanah persatuan luas tanah dan waktu tertentu Supiandi Sabiham (2007, dalam Sumarsono, 2008 : 2-3).

Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi perubahan penggunaan tanah, maka dalam waktu yang tidak lama tanah di sekitarnya juga akan berubah penggunaannya secara progresif. Menurut Irawan (2005, dalam Irsalina, 2010), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi perubahan penggunaan tanah, aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya permintaan tanah oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga tanah di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga tanah selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual tanah.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2006 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta luas tanah sawah 57.661 ha dengan penyusutan luas tanah sawah tiap tahun sebesar 0,40% atau setara 233,4 ha. Penyusutan tiap kabupaten atau kota sebagai berikut Kota Yogyakarta sebesar 6,48%, Kabupaten Sleman sebesar 0,61%, Kabupaten Bantul sebesar 0,61%, Kabupaten Gunungkidul

sebesar 0,09% dan Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,02% (Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 2009).

Hampir setengah wilayah Kabupaten Sleman merupakan tanah pertanian yang subur dan didukung irigasi yang baik di bagian barat dan selatan. Perkembangan Kabupaten Sleman sebagai daerah pemukiman dan perumahan sangat signifikan. Perubahan penggunaan tanah sawah di Kabupaten Sleman secara umum memang tinggi, rata-rata perubahan penggunaan tanah sawah di Kabupaten Sleman ini lebih kurang 50 hektar setiap tahunnya. Kabupaten Sleman sendiri merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana sekitar 35 – 40 persen produksi padi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berasal dari Kabupaten Sleman, diambil dari www.Bappenas.go.id (dalam Nurasa, 2008:6).

Dilaporkan Yunus (2001, dalam Anamuntianasir, 2009:24), kawasan pinggiran kota baik sebelah barat, timur, utara, dan selatan Kota Yogyakarta masih banyak dijumpai tanah persawahan dan tegalan produktif. Kecamatan gamping merupakan kecamatan yang keberadaannya dipinggir Kota Yogyakarta. Penggunaan tanah sawah di Kecamatan Gamping menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tahun 2009 seluas 1.144,7 Ha yang hampir setengahnya dari keseluruhan luas Kecamatan Gamping yang seluas 2.925 Ha. Wilayah yang datar, dekat dengan sumber air, dan berada di pinggiran kota sangat riskan terjadinya perubahan penggunaan tanah, tak heran jika di wilayah Kecamatan Gamping mulai tumbuh permukiman-permukiman baru.

Lokasi Desa Trihanggo sangat strategis, yaitu diantara Jalan Godean yang merupakan jalan menuju Kota Yogyakarta dan Jalan Ring Road Utara dan Barat. Lokasi yang strategis dipinggiran kota mempunyai potensi tinggi terjadinya perubahan penggunaan tanah. Desa Trihanggo merupakan salah satu desa yang menjadi wilayah *urban fringe* Kota Yogyakarta, yaitu daerah pinggiran Kota Yogyakarta yang merupakan wilayah peralihan desa-kota. Perkembangan wilayah perkotaan secara sistematis mendesak keberadaan wilayah perdesaan. Perkembangan kenampakan fisik kota merupakan simbol bagi sebuah kemajuan yang kemudian semakin mempertinggi intensitas perubahan penggunaan tanah (Sutaryono, 2007:64-66).

Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian tidak menguntungkan bagi pertumbuhan sektor pertanian karena dapat menurunkan kapasitas produksi dan daya serap tenaga kerja yang selanjutnya berdampak pada penurunan produksi pangan dan pendapatan per kapita keluarga tani. Perubahan penggunaan tanah merupakan *issu* strategis dalam rangka pemantapan ketahanan pangan nasional, peningkatan kesejahteraan petani, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi berbasis pertanian. Perubahan penggunaan tanah mempunyai dampak lingkungan yang kurang baik, misalnya dengan semakin ramainya lingkungan menjadi situasi tidak aman dari kejahatan dan terjadi banyak polusi baik udara, air maupun tanah. Sehingga lingkungan tidak sehat dan tidak nyaman lagi untuk tempat tinggal.

Bumi merupakan tempat hidup dan sumber kehidupan manusia, sehingga perlu di jaga kelestariannya. Kita harus sadar tentang penggunaan

tanah yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada hakekatnya adalah upaya mencari keseimbangan antara faktor daya dukung tanah dan faktor sosio-ekonomi masyarakat yang menggunakan tanah. Penggunaan dan pemanfaatan tanah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, namun tetap mencerminkan prinsip rasa keadilan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan hidup. Alam akan terjaga keberadaannya tanpa manusia, sedangkan manusia tidak dapat terjamin kelestariaannya tanpa adanya alam (Budihardjo dan Sujarto, 1999 : 21). Pemaduserasian faktor-faktor tersebut akan selalu menjadi tantangan dalam menentukan kebijakan terkait dengan tanah sebagai upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian. Perlu adanya pendeteksian dini mengenai penyebab dan dampak perubahan penggunaan tanah untuk menjaga kelestarian alam dan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Penyebab dan Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman?

2. Apa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana dampak terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman?
4. Bagaimana upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang telah dilakukan di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui jenis, luas, dan sebaran spasial perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
2. Mengetahui penyebab (faktor internal, eksternal, dan kebijakan) terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
3. Mengetahui dampak fisik, sosial, dan ekonomi dari terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;

4. Mengetahui upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang telah dilakukan di desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Dalam bidang akademik, dapat menjadi sumbangan informasi dalam studi tentang jenis, luas, sebaran spasial, penyebab, dampak, serta upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian khususnya di suatu wilayah yang berkembang cepat seperti Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman;
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada kantor pertanahan serta pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan pertanahan yang berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian khususnya di Desa Trihanggo Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

E. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian yang terjadi secara terus menerus dan tidak disertai dengan upaya pengendalian akan mengancam keberlanjutan alam dan harmoni sosial. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian, penyebabnya, dampak yang

ditimbulkan, dan pengendaliannya, maka dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah

ini :

Tabel 1. Daftar Penelitian Skripsi terdahulu yang terkait keaslian Penelitian

No.	Nama Peneliti (Perguruan Tinggi/Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Novitasari Priyanti Dewi (Sekolah Tinggi Pertanian Nasional/2005)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Menjadi Tanah Nonpetanian di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Provinsi D.I Yogyakarta	<p>1. Secara bersama-sama variabel luas bidang tanah yang dimiliki, jarak bidang tanah ke pusat kegiatan, jarak bidang tanah ke jalan aspal terdekat dan produktivitas tanah mempunyai pengaruh nyata terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kecamatan Gamping sebesar 89,6% dan masih ada 10,4% yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel tersebut; Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kecamatan Gamping menurut tingkat besarnya pengaruh berturut-turut adalah: (a) Jarak bidang tanah ke jalan aspal terdekat, (b) NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak), (c) Jarak bidang tanah ke pusat kegiatan, (d) Luas bidang tanah yang dimiliki, (e) Produktivita tanah;</p> <p>2. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi tanah non pertanian di Kecamatan Gamping adalah jarak bidang tanah ke jalan aspal terdekat. Hal tersebut karena akses jalan merupakan faktor yang penting dalam pengembangan pembangunan wilayah.</p>	Meneliti tentang perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian dan metode penelitian survei	Judul penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian, format penelitian kuantitatif, dan lokasi penelitian dalam satu Kecamatan yaitu Kecamatan Gamping

Bersambung

Tabel 1. (sambungan)

2.	Ahmad Nurasa (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/2008)	Upaya Mencegah Alih Fungsi Tanah sawah Menjadi Nonsawah di Kecamatan Gamping, Kecamatan Godean, dan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1. Strategi pengendalian alih fungsi tanah sawah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu instrumen kebijakan yang memerlukan pendekatan holistik; 2. Koordinasi antar instansi dibawah pimpinan Bupati yang bernaung dalam suatu wadah atau <i>Team Work</i> dalam hal-hal tertentu sudah berjalan dengan cukup baik. Tapi pelaksanaannya masih terdapat kendala.	Meneliti upaya pencegahan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian	Judul penelitian, lokasi penelitian di tiga kecamatan, dan metode penelitian deskriptif
3.	Bambang Sumarsono (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/2008)	Pengaruh Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali	1. Faktor Penyebab terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di wilayah kecamatan Ngemplak adalah : a. Faktor eksternal : tekanan penduduk di Kecamatan Ngemplak yang menyebabkan terjadinya alih fungsi tanah pertanian menjadi permukiman dalam pembahasan ini digunakan istilah kebutuhan rumah dan pembangunan fasilitas kehidupan, dalam hal ini adalah Lingkungan Siap Bangun (LISIBA) di Kecamatan Ngemplak b. Faktor internal : alasan ekonomi berupa keinginan untuk mendapat penghasilan lebih besar dibandingkan bertani dengan cara mengubah penggunaan tanah dari pertanian menjadi tempat usaha dan alih profesi pekerjaan dari petani menjadi non petani sehingga tanah yang sebelumnya dipergunakan untuk usaha pertanian diubah penggunaannya menjadi	Meneliti dampak perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian	Judul penelitian pengaruh perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian terhadap ketahanan pangan, lokasi penelitian di Kabupaten Boyolali, dan metode penelitian deskriptif

Bersambung

Tabel 1. (sambungan)

			<p>usaha non pertanian.</p> <p>2. Besarnya pengaruh alih fungsi tanah pertanian menjadi nonpertanian terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 adalah 94,8%.</p> <p>3. Kebijakan instansi yang berwenang dalam mengendalikan alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih selektif dengan pemberian ijin perubahan penggunaan tanah. 2. Rencana pembangunan perumahan dan permukiman dialokasikan pada tanah-tanah non pertanian. 		
4.	Vino Anamuntianasir (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/2009)	Urbanisasi, Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Kehilangan Produksi Pertanian di Wilayah Kota dan Pinggiran Kota Yogyakarta	<p>Di wilayah Kota dan Pinggiran Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 1996-2006 telah mengalami urbanisasi yang signifikan yang ditandai oleh adanya indikator terjadinya transformasi spasial (pertumbuhan penduduk, pembangunan fasilitas umum, utilitas umum, densifikasi permukiman).</p> <p>1. Intensitas urbanisasi meningkat di wilayah-wilayah kota dan pinggiran kota sebagai fungsi dari peningkatan kondisi transformasi spasial;</p> <p>2. Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di wilayah kota dan pinggiran Kota Yogyakarta terjadi sangat pesat;</p> <p>3. Alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian di wilayah kota dan pinggiran Kota Yogyakarta menunjukkan intensitas yang beragam</p>	Meneliti dampak perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian	Judul penelitian dampak perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian terhadap kehilangan produksi pertanian, lokasi penelitian di kota dan pinggiran Kota Yogyakarta, dan metode penelitian deskriptif

Bersambung

Tabel 1. (sambungan)

			4. sebagai fungsi dari keragaman urbanisasi yang terjadi; Besarnya kehilangan produksi pertanian di wilayah kota dan pinggiran Kota Yogyakarta berkorelasi positif dengan intensitas alih fungsi tanah pertanian yang terjadi di wilayah tersebut.		
5.	Eli Noviyanti (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional/2010)	Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Terhadap Kehilangan Produksi Pertanian dan Ketersediaan Pangan Pada Daerah Kota dan Pinggiran Kota di Kabupaten Bantul	1. Perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi pada daerah kota dan pinggiran kota di Kabupaten Bantul di lokasi penelitian dalam kurun waktu 11 tahun (1996-2007) seluas 2.457,72 ha atau sebanyak 43,5% dari luas tanah pertanian lokasi penelitian tahun 1996. Luas perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang terjadi di lokasi penelitian berdistribusi menyebar ke seluruh bagian wilayah dan intensitasnya menunjukkan kecenderungan menurun ke arah menjauhi kota; 2. Besarnya kehilangan produksi pertanian pada daerah kota dan pinggiran kota di Kabupaten Bantul dalam penelitian ini rata-rata adalah 4.064 jiwa setiap tahunnya. Yang artinya bahwa daerah penelitian ini kehilangan pangannya setara untuk 4.064 jiwa tiap tahunnya. Dan berdasarkan desa sampel rata-rata untuk ketersediaan pangan setelah terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah setara dengan 15.094 jiwa.	Meneliti dampak perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian	Judul penelitian dampak perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian terhadap kehilangan produksi pertanian dan ketersediaan pangan, lokasi penelitian di Kabupaten Bantul, dan metode penelitian deskriptif analisis

Sumber : Perpustakaan STPN Yogyakarta Tahun 2011

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo : a) Jenisnya menjadi rumah, perumahan, tempat usaha nonpertanian, fasum, dan fasos; b) Seluas 68,9452 Ha atau sekitar 20% dari luas sawah yang ada; c) Sebaran spasial perubahannya mengikuti jaringan jalan;
2. Penyebab perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo karena : a) Penyebab intern yang meliputi : pemenuhan kebutuhan petani dan sempitnya tanah pertanian yang dimiliki; b) Penyebab ekstern yang meliputi : kepadatan penduduk, tingginya laju urbanisasi, peningkatan nilai ekonomi sawah di lokasi strategis, pembangunan proyek pemerintah, dan perkembangan kota; dan c) Penyebab peraturan dan implementasinya yang meliputi : kurang memahami Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, kurang tegasnya pelaksanaan dan sanksi peraturan yang ada;
3. Dampak perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo: a) Dampak positif yang meliputi : 1) Fisik (tata letak tempat tinggal diperumahan menjadi

rapi dan tersedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial), 2) Ekonomi (ketersediaan lapangan pekerjaan baru seperti tukang batu, tukang kayu, satpam, sopir, dan buruh nonpertanian), 3) Sosial (perubahan mata pencaharian petani menjadi nonpertanian) dan b) Dampak negatif yang meliputi : 1) Fisik (pencemaran lingkungan (sampah) dan penciptaan tanah pertanian), 2) Ekonomi (petani tidak memiliki tanah pertanian lagi, petani kehilangan pekerjaan, dan merugikan pemerintah dalam investasinya di sistem irigasi), 3) Sosial (menurunnya perilaku kelembagaan masyarakat seperti wiwit, gotong royong, dan ronda malam);

4. Upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian yang terjadi di Desa Trihanggo yaitu : dengan membuat peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Kabupaten Sleman, sistem dan manajemen penguasaan tanah, memberikan insentif dan disinsentif kepada pelaku perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian, dan sosialisasi peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian (baik media elektronik maupun secara langsung). Pelanggaran peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian Desa Trihanggo masih ada, baik oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah sendiri.

B. Saran

1. Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo sebagian besar mengikuti jaringan jalan atau di pinggir jalan, sehingga perlu dirancang Desain Tata Ruang Desa yang memungkinkan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di pinggir jalan dan di belakangnya dipertahankan untuk tanah pertanian;
2. Sempitnya tanah pertanian terjadinya karena waris menyebabkan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo, sehingga perlu sistem pembagian waris dengan tidak memecah setiap bidang tanah menjadi beberapa bagian kepada setiap ahli waris dengan membagikan satu bidang tanah untuk satu ahli waris;
3. Dampak negatif perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian seperti penumpukan sampah tidak pada tempatnya perlu diperhatikan, yaitu dengan pembuatan bak tempat sampah atau tempat pembuangan sampah sementara di Desa Trihanggo;
4. Peran aktif perangkat desa dari Ketua RT, Ketua RW, dan Pamong Desa untuk mencegah dengan pengawasan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo;
5. Pelanggaran RDTRW sudah mencapai 19,4445 Ha atau 26,55% dari seluruh perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo, sehingga perlu adanya sanksi dan penegakan peraturan perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi nonpertanian di Desa Trihanggo oleh pemerintah secara tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anamuntianasir, V. 2009. Urbanisasi, Alih Fungsi Tanah Pertanian, dan Kehilangan Produksi Pertanian di Wilayah Kota dan Pinggiran Kota Yogyakarta. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Arafat. Y. 2009. Kemiskinan Dalam Perspektif Penggunaan Tanah (Studi di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur). Skripsi Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Arikunto, S. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman. 2007. Fakta dan Analisa. Yogyakarta.
- Budihardjo, E. dan Sujarto, D. 1999. Kota Berkelanjutan. Penerbit Alumni, Bandung.
- Ilham, N dkk. 2008. Perkembangan dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya. Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor dan Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian IPB Bogor. Di unduh dari (<http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/%2811%29%20socanyak%20ilham%20dkk-konversi%20lahan%281%29.pdf>), tanggal 30 Desember 2010
- Indradi, Ig. 2002. Pengaruh Nilai Lahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Majalah Bhumi nomor 2 tahun 2. h.15-25.
- Indradi, Ig dkk. 2008. Tata Guna Tanah. Modul Kuliah Penatagunaan Tanah Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Irsalina, S. 2010. Analisis Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Langkat. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan. Di unduh dari (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20990/4/Chapter%20II.pdf>), tanggal 30 Desember 2010.
- Mulyanto, B. 2010. Refleksi Peran Tanah dan Arah Pengembangan Ilmu Tanah dalam Upaya Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat. Orasi Ilmiah Guru Besar Institut Pertanian Bogor.

- Nazir. 1988. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugraheni, H. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Skripsi Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Noviyanti, E. 2010. Dampak Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Nonpertanian Terhadap Kehilangan Produksi Pertanian dan Ketersediaan Pangan Pada Daerah Kota dan Pinggiran Kota di Kabupaten Bantul. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Setyoningsih, E.C. 2009. Urbanisasi, Alih Fungsi Tanah Pertanian, dan Harga Tanah di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Soedjarto, V.D. 2009. Urbanisasi, Perubahan Pola Penggunaan Tanah dan Dampaknya di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Sugiyono. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sumarsono, B. 2008. Pengaruh Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Nonpertanian Terhadap Ketahanan Pangan Masyarakat di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Skripsi Program Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Sutaryono. 2003. Dualisme Perkembangan Wilayah dan Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah. Majalah Widya Bhumi nomor 10 tahun 4. h.13-19.
- Sutaryono. 2007. Dinamika Penataan Ruang Dan Peluang Otonomi Daerah. Tugu Jogja Grafika, Yogyakarta.
- Yuliana. 2007. Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta. Skripsi Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011, tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam penertiban Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pemetaan Penggunaan Tanah Perdesaan, penggunaan Tanah Perkotaan, Kemampuan Tanah dan Penggunaan Simbol/Warna Untuk Penyajian Dalam Peta

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 410-1851 perihal Pencegahan Penggunaan Tanah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Tanah Nonpertanian

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Peraturan Bupati Sleman Nomor 22 Tahun 2009, tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah

BERITA INTERNET

Majalah Tempo, Hari Selasa, Tanggal 19 Oktober 2010, yang di unduh dari (<http://www.tempointeraktif.com/hg/kesra/2010/10/19/brk,20101019-285658,id.html>), tanggal 30 Desember 2010.

Koran Suara Indonesia, Hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2010, yang di unduh dari (<http://suar.okezone.com/read/2010/08/24/279/365974/penduduk-indonesia-meledak-lagi>), tanggal 30 Desember 2010.

Dinas Pertanian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2009, yang di unduh dari (<http://distan.pemda-diy.go.id/index.php?option=content&task=view&%20id=574&Itemid=67>), tanggal 30 Desember 2010.